

LAPORAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024

DPMPTSP PROVINSI NTT

2024

**LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DPMPTSP PROVINSI NTT
KEADAAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTT pada Urusan Penanaman Modal, Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan serta Anggaran (DPA) Tahun 2024 yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan tersebut difindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, yang memuat komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana kinerja baik kinerja keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 maupun hasil yang dicapai (outcome) dari program yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dipertanggungjawabkan kepada Gubernur NTT sebagai pimpinan. Untuk itu, seluruh unit kerja (sekretariat, bidang/sub bidang) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2024 tentunya berkomitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang diperjanjikan.

Untuk mengukur capaian Kinerja digunakan Formula apabila semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin tinggi Kinerja demikian sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah Kinerja.

Sedangkan untuk mengukur Laju Pertumbuhan Kinerja Investasi digunakan Formula Realisasi Investasi Tahun ini dikurangi Tahun sebelumnya dibagi dengan Tahun sebelumnya.

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Perkembangan (\%)} = \frac{\text{Realisasi saat ini} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 1
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Urusan Penanaman Modal
Tahun 2024 Keadaan s/d Triwulan II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 Meningkatkan realisasi investasi	1. Penambahan Nilai Realisasi Investasi	5,7 T	Rp.. 976.074.977.806,-	17,12%
	1. Laju pertumbuhan PMDN	0,7%	Rp. 529.032.637.971,-	-64,36%
	2. Laju pertumbuhan PMA	0.3%	Rp. 447.042.339.835,-	1,8%
2 Terwujudnya kepuasan layanan Perizinan & Non Perizinan	3. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100% (5.000 Izin)	3.162	63,24%
	4. Nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat	95	91,31	98,28

- 1) Capaian Indikator **Kinerja Penambahan Nilai Realisasi Investasi** . Target yang ingin dicapai tahun 2024 adalah 5,7 Triliun, dengan Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2024 I Rp 976.074.977.806. atau sebesar 17,12% dengan Rincian PMDN Rp. 529.032.637.971,- (13,26%)

PMA Rp. 447.042.339.835,- (26,14%). Capaian Triwulan I sebesar 68,50% dari Target Triwulan I sebesar Rp.1.425.000.000.000,-

Tahun 2024 secara Nasional Target Realisasi Investasi Untuk Provinsi NTT sebesar Rp 6.260.000.000.000, dengan Realisasi Investasi Triwulan I Rp 976.074.977.806,- atau sebesar 15,96 % dengan rincian sebagai berikut: Realisasi PMDN senilai Rp. 529.032.637.971,- dari target Rp. 3.972.000.000.000; Realisasi PMA senilai Rp. 447.042.339.835,- dari target Rp. 2.648.000.000.000,- Penyerapan tenaga kerja, TKI sebanyak 866 orang. Lima Besar Negara penyumbang investasi di Provinsi NTT antara lain Singapura, Amerika, Jepang, Swis dan Italia

- 2) Capaian indikator **Kinerja Laju Pertumbuhan PMDN** : Target yang ingin dicapai adalah 0,7 %. Realisasi PMDN Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 529.032.637.971,- bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.484.219.200.000,- maka ada penurunan sebesar Rp. 955.186.562.029, atau -64,36%
- 3) Capaian indikator **Kinerja Laju Pertumbuhan PMA** : Target yang ingin dicapai adalah 0,3 %. Realisasi PMA Triwulan I senilai Rp. 447.042.339.835,- bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 162.080.720.000,- maka ada peningkatan sebesar Rp. 447.042.339.835,- atau 1,8%
- 4) Capaian **indikator Kinerja Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP**. Target 100 %, Realisasi s/d bulan Juni Tahun 2024 jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP mencapai 63,24%. Target Jumlah Izin yang diterbitkan 5.000 Izin realisasi 3.162 izin atau 63,24%
- 5) Capaian **Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**. Target kinerja tahun 2024 sebesar 95, Realisasi Triwulan I 93,37 atau capaian Kinerjanya 98,28%. Triwulan II 91,31% atau capaian Kinerjanya 96,11% . Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode

yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, prilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.**

A. Perkembangan Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2024

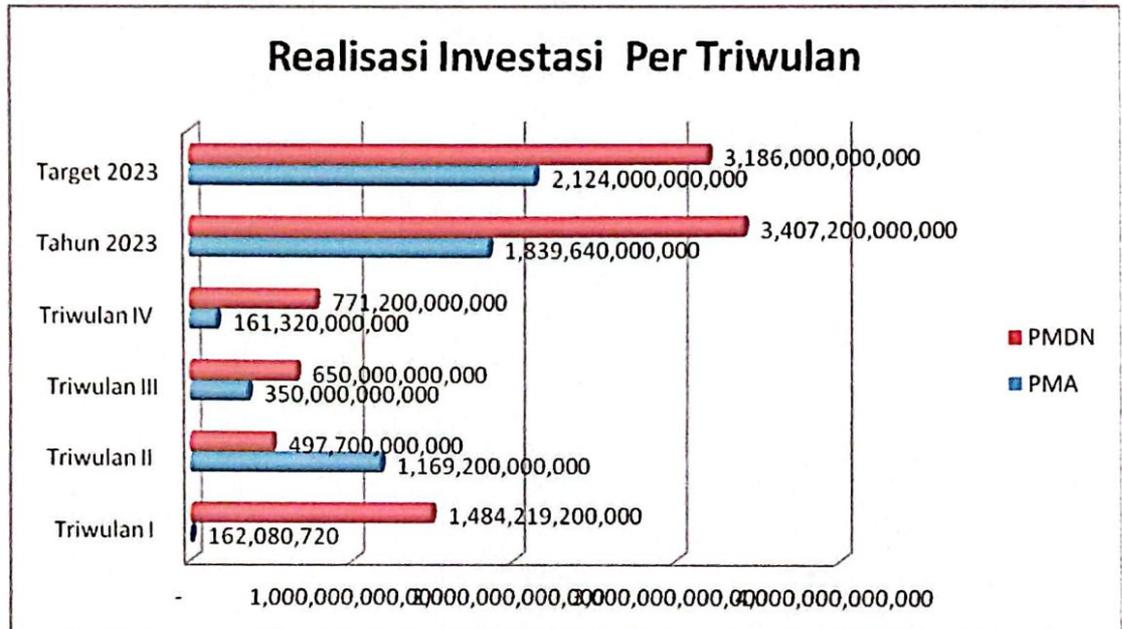
a. Target dan Realisasi Investasi

Target Realisasi Investasi untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 5,7 T. dengan Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2024 I Rp 976.074.977.806,- atau sebesar 17,12% dengan Rincian PMDN Rp. 529.032.637.971,- (13,26%) Rp. 447.042.339.835,- (26,14%). Data Realisasi Investasi per Kabupaten / Kota sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 di Provinsi NTT dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

REALISASI INVESTASI PER KABUPATEN / KOTA S/D TRWULAN I TAHUN 2024 DI PROVINS INTT				
Kab/kota	Peringkat Target	Nilai Inv. Mata Uang (Rp.)	TKI	
Kota Kupang	1	890.000.000.000	396.355.000.000	293
Kab. Sumba Timur	2	650.000.000.000	217.303.000.000	17
Kab. Manggarai Barat	3	1.000.000.000.000	161.748.000.000	98
Kab. Kupang	4	725.000.000.000	50.039.000.000	5
Kab. Rote Ndao	5	150.000.000.000	38.920.000.000	56
Kab. Ende	6	180.000.000.000	31.741.000.000	10
Kab. Sumba Barat Daya	7	300.000.000.000	17.498.000.000	9
Kab. Manggarai	8	170.000.000.000	10.017.000.000	37
Kab. Timor Tengah Utara	9	200.000.000.000	9.957.000.000	48
Kab. Alor	10	250.000.000.000	9.214.000.000	17
Kab. Timor Tengah Selatan	11	175.000.000.000	8.782.000.000	31
Kab. Sumba Barat	12	250.000.000.000	7.645.000.000	136
Kab. Flores Timur	13	250.000.000.000	4.404.000.000	0
Kab. Lembata	14	150.000.000.000	3.703.000.000	13
Kab. Malaka	15	150.000.000.000	2.573.000.000	3
Kab. Belu	16	20.000.000.000	1.880.000.000	0
Kab. Sikka	17	200.000.000.000	1.522.000.000	45
Kab. Ngada	18	100.000.000.000	1.112.000.000	9
Kab. Manggarai Timur	19	100.000.000.000	1.050.000.000	3
Kab. Nagekeo	20	150.000.000.000	353.000.000	36
Kab. Sumba Tengah	21	150.000.000.000	150.000.000	0
Kab. Sabu Raijua	22	50.000.000.000	109.000.000	0
Total Provinsi NTT		6.260.000.000.000	976.075.000.000	866

Gambar. 1
Realisasi Investasi Per Kabupaten / Kota
s/d Triwulan I Tahun 2024

Tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.646.299.920.000,- atau tidak mencapai Target Triwulan I atau capaian hanya 17,12% .Data Realisasi Investasi per Triwulan Tahun 2023 di Provinsi NTT, sebagaimana pada gambar 2 berikut.



Gambar 2
Realisasi Investasi Tw. I s/d Tw IV
Tahun 2023

b. Target dan Realisasi Perizinan

Target dan Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : Target jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2024 sebanyak 5.000 Ijin Realisasi s/d bulan Juni Tahun 2024 sebanyak 3.162 buah Izin (63,24 %).

Dari tahun ke tahun jumlah jenis izin yang didelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Gubernur kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terus meningkat. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 : ada 118 Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada DMPTSP, terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan, tahun 2018 melalui Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 ada tambahan 2 Bidang dan 40 jenis izin, sehingga menjadi 158 perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan Tahun 2019 direvisi menjadi Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Tahun 2020 ada tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Koperasi. Sehingga jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sampai saat ini kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 18 Bidang dan 158 jenis izin dan non izin. Pada tahun 2021 direvisi menjadi, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan (Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT).

Sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelegaraan perizinan berusaha berbasis resiko mengategorikan semua jenis kegiatan usaha dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan kegiatan usaha beresiko tinggi). Untuk yang beresiko rendah (cukup dengan **Nomor Induk Berusaha/NIB**), resiko menengah rendah (**NIB & Sertifikat Standar/SS berupa purnatahan mandiri**), resiko menengah tinggi (NIB & Sertifikat Standar/SS yang diverifikasi) dan usaha yang resiko tinggi (**NIB & Izin**). Dari aspek modal usaha, yaitu Usaha Mikro (di bawah Rp. 1 Miliyad), Usaha Kecil (di atas Rp. 1 M - 5 M), Usaha Menengah (Rp. 5 M - 10 M) dan Usaha Besar (di atas R. 10 Miiyard).

Untuk implementasinya Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi NTT. Dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2022, jenis perizinan berusaha dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- A. Perizinan Berusaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), ada 11 Sektor dan 759 jenis usaha yang terdiri dari ber KBLI : 744 jenis usaha dan PB-UMKU : ada 15 jenis usaha ;
- B. Perizinan Berusaha Non KBLI, ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha;
- C. Perizinan Non Berusaha dan Non KBLI : ada 4 Sektor dan 8 jenis usaha ;
- D. Non Perizinan : ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha.

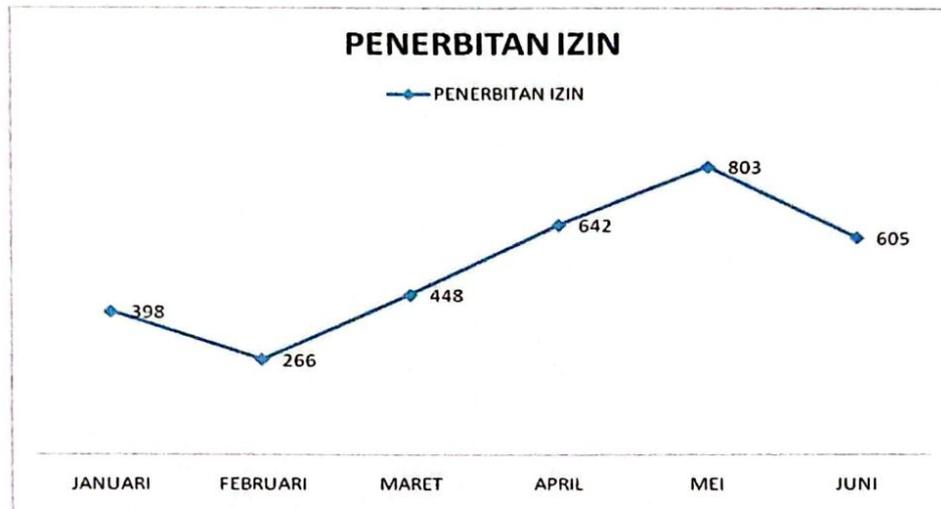
Untuk proses pelayanan perizinan menggunakan 2 (system), yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko melalui System Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) dan non elektronik /manual lebih banyak izin penelitian dan yang non perizinan.

Pada tahun 2022 dilakukan revisi terhadap Pergub Nomor 37 Tahun 2021 dengan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, dimana semua jenis perizinan di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori sesuai tingkatan resiko pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, resiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko tinggi (amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Ada 787 jenis perizinan dan 24 jenis non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTP Provinsi NTT. Data perizinan berusaha menurut sektor Tahun 2023 di Provinsi NTT sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini.

No.	Sektor	Jumlah Izin	Jumlah SOP
A.	Perizinan Berusaha Sesuai KBLI & PB-UMKU	759 Jenis Perizinan	759
1.	Sektor Kesehatan	9 (sembilan) Jenis izin	9
2.	Sektor Perhubungan	30 (tiga puluh jenis perizinan	30
3.	Sektor Pertanian	24 (dua puluh tiga) jenis perizinan	24
4.	Sektor Lingkungan Hidup	31 (tiga puluh satu) jenis perizinan	

	dan Kehutanan		
5.	Sektor Kelautan dan Perikanan	77 (tujuh puluh tiga) jenis perizinan	77
6.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	43 (empat puluh tiga) jenis perizinan	43
7.	Sektor Pariwisata	24 (dua puluh empat) jenis perizinan	24
8.	Sektor Perdagangan	1 (Satu) jenis perizinan	1
9.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis perizinan	2
10.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2 (dua) jenis perizinan	2
11.	Sektor Perindustrian	513 (lima ratus tiga belas) jenis perizinan	513
B.	Perizinan Berusaha Non KBLI	24 Jenis Perizinan	
1.	Sektor Sosial	1 (Satu) jenis perizinan	1
2.	Sektor Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 (Satu) jenis perizinan	1
3.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 (satu) jenis perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	8 (delapan) jenis perizinan	8
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 (empat) jenis perizinan	4
7.	Sektor Perdagangan	1 (satu) jenis perizinan	1
8.	Sektor ESDM	6 (enam) jenis perizinan	6
C.	Perizinan Non Berusaha Non KBLI	8 Jenis Perizinan	
1.	Sosial	2 (dua) jenis perizinan	2
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
3.	Peternakan	1 (satu) jenis perizinan	1
4.	Kesbangpol	3 (tiga) jenis perizinan	3
D.	Non Perizinan	24 Jenis Perizinan	
1.	Sektor Kesehatan	2 (dua) jenis non perizinan	2
2.	Sektor Perhubungan	3 (tiga) jenis non perizinan	3
3.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis non perizinan	2
4.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 (satu) jenis non perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	3 (tiga) jenis non perizinan	3
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 (sembilan) jenis non perizinan	9
7.	Sektor Perdagangan	2 (dua) jenis non perizinan	2
8.	Sektor Kesbangpol	2 (dua) jenis non perizinan	2
	Total	798 Jenis Perizinan & Non Perizinan	798

Perizinan yang diterbitkan Tahun 2024 s/d Triwulan II sebanyak 3.162 buah Izin, dari Target sebanyak 5.000 Izin atau rata – rata perbulan ± 527 buah Izin yang diterbitkan , atau perhari sebanyak 23 Izin. Capaiannya 63,24 %. Data jumlah izin yang diterbitkan tahun 2024 (**Proses Penerbitan Izin Melalui Front Office DPMPSTP Provinsi NTT, pemohon datang langsung ke kantor**) , adalah sebagaimana pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar. 3
Garfik Izin yang diterbitkan per bulan
s/d Triwulan I Tahun 2024

Izin yang diterbitkan s/d Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 3.162 Izin dari Target 5.000 Izin atau 63,24% dengan Rincian per Bidang sebagai berikut :

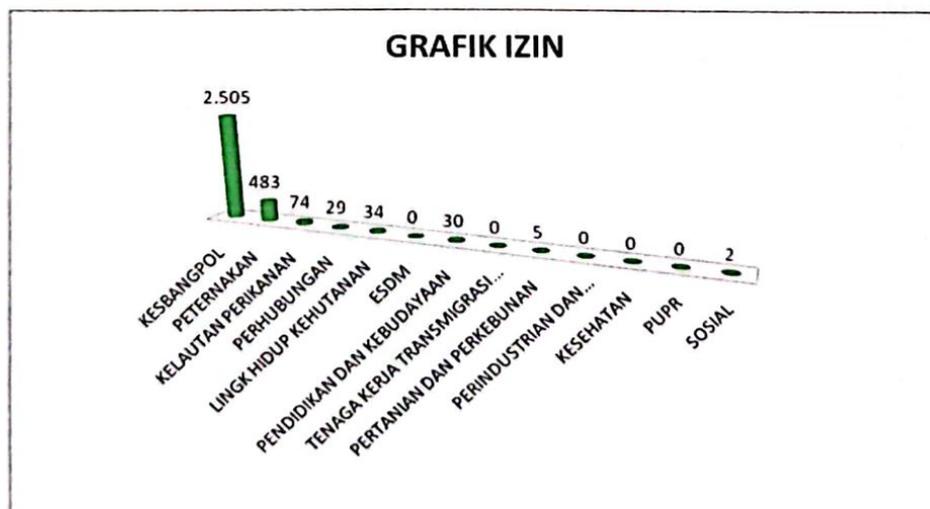
Tabel
Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan Berdasarkan Bidang
Keadaan s/d Juni Tahun 2024

NO.	BIDANG PERIZINAN	s/d Triwulan II Tahun 2024
1.	KESBANGPOL	2.505
2.	PETERNAKAN	483
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	74

4.	PERHUBUNGAN	29
5.	LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	34
6.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	-
7.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30
8.	TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI	-
9	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5
10	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-
11	KESEHATAN	-
12	PUPR	-
13	BIDANG SOSIAL	2
	Jumlah	3.162

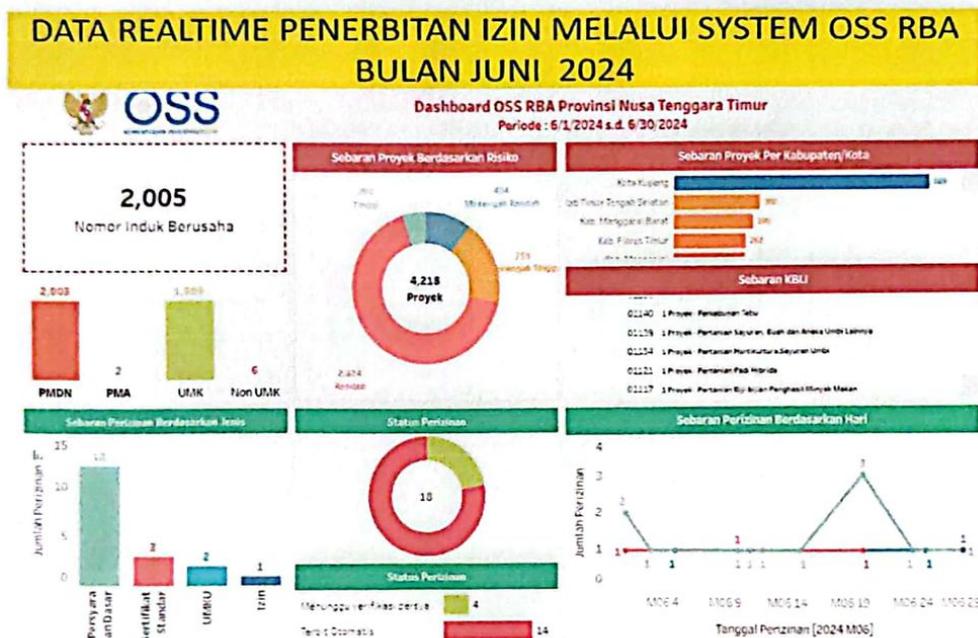
Izin yang diterbitkan; realisasi s/d bulan Juni Tahun 2024 sebanyak 3.162 buah izin yang diterbitkan atau (63,24 %).

Data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan s/d bulan Juni Tahun 2024 pada masing – masing bidang di Provinsi NTT sebagaimana Gambar 4 berikut.

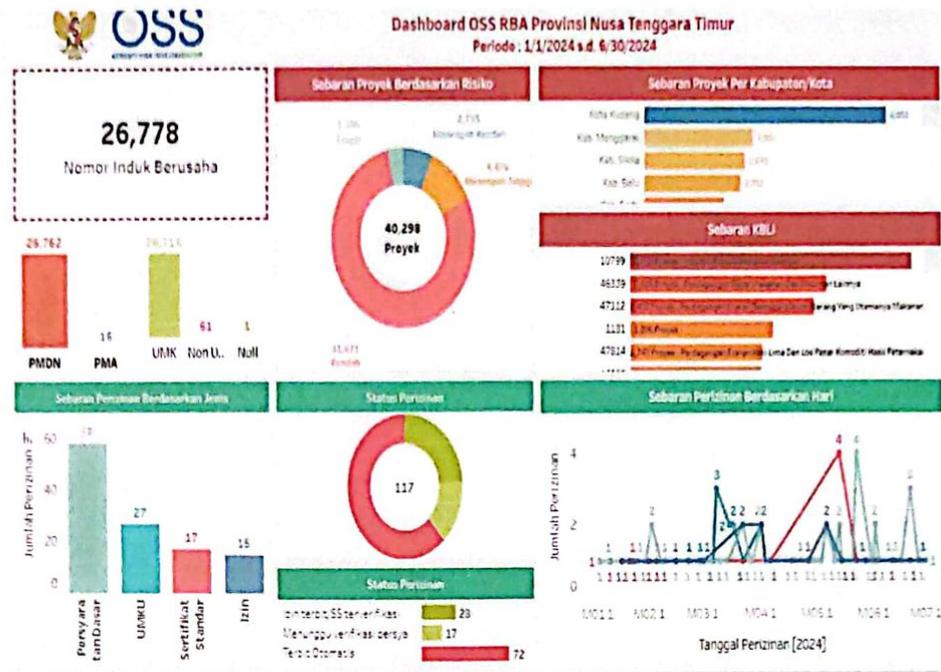


Gambar 4
Grafik Izin yang diterbitkan per Bidang
s/d Triwulan I Tahun 2024

Jumlah perizinan yang diproses melalui OSS RBA Periode 01 Januari – 30 Juni 2024, yaitu : ada 26.778 NIB, terdiri dari PMA ada 14 NIB dan PMDN ada 24.762 NIB. Jumlah NIB untuk UMK ada 26.714 NIB, dan Non UMK ada 61 NIB. Jumlah Sertifikat Standar yang diterbitkan ada 17 SS ; 15 Persyaratan Dasar, UMKU ada 27 dan Izin ada 58 izin. Data realtime perizinan yang diproses dan diterbitkan melalui OSS RBA periode 01 Januari – 30 Juni 2024 dan periode 01 Juni – 30 Juni 2024 , adalah sebagaimana pada Gambar 5 dan 6 berikut.



Gambar 5
Grafik Grafik Data realtime perizinan yang diproses dan diterbitkan melalui OSS RBA periode 01 Juni – 30 Juni 2024



Gambar 6
Grafik Data realtime perizinan yang diproses dan diterbitkan melalui OSS RBA periode 01 Januari – 30 Juni 2024

B. Permasalahan, Dampak dan Upaya yang dilakukan

1. Permasalahan dan Dampak

- a) Belum optimalnya pelaksanaan tugas dari Tim Teknis.
- b) Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- c) Pelaksanaan kegiatan tidak dilengkapi dengan TOR kegiatan, sehingga hampir dipastikan sasaran, hasil dan keluaran tidak terukur ;
- d) Seringnya lakukan revisi DPA, mengganggu penyerapan anggaran ;
- e) Pengajuan TOR kegiatan sekedaranya saja tidak memenuhi unsur penyusunan TOR (kerangka acuan kerja) sesuai regulasi atau ketentuan yang berlaku (Judul TOR, Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud, Tujuan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Sasaran, Hasil, Keluaran, Tempat (lokasi) dan Waktu

pelaksanaan kegiatan, sumber dana (APBN, APBD), Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, item belanja, akun belanja/kode belanja sesuai DPA atau DIPA);

- f) Lambatnya penyelesaian administrasi pertanggungjawaban kegiatan termasuk perjalanan dinas (sesuai regulasi paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan perjalanan sudah harus menyampaikan administrasi dan laporan perjalanan dinas), sehingga berpengaruh pada tahapan pengajuan anggaran ;
- g) Perjanjian Kinerja berjenjang belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala pada masing-masing unit kerja antara yang diperjanjikan dengan hasil (output) aktivitas harian dan bulanan ;
- h) Perubahan struktur organisasi dominan jabatan fungsional belum berdampak cukup signifikan pada mekanisme dan pola kerja fungsional (untuk adanya inisiatif, inovasi dan kreativitas kerja dari pegawai).

2. Upaya yang dilakukan

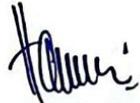
- a) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk percepatan verifikasi dokumen permohonan pelaku usaha.
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Perda / Pergub terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha.
- c) Melakukan migrasi perizinan secara manual ke Pelayanan secara elektronik melalui Aplikasi Si Cantik Cloud .
- d) Melakukan kordinasi dengan Bagian Anggaran untuk percepatan pelaksanaan Anggaran.

C. Penutup

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan keadaan s/d Triwulan II Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dibuat dan kiranya menjadi bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT pada masa yang akan datang.

Kupang, 12 Juli 2024

a.n. Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP ↵
K Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Pj. Sekretaris



Herry H. A. Pandie, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19710830 200112 1 004

**EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEADAAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS (RPJMD/ RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENJELASAN
I. Komponen Kinerja Utama					
Meningkatnya Realisasi Investasi	1. Penambahan Nilai Realisasi Investasi	5,7 T	Rp. 976.074.977.806,-	17,12%	Data Realisasi keadaan s/d Triwulan I Tahun 2024
	2. Laju Pertumbuhan PMDN	0,7%	Rp. 529.032.637.971,-	(64,36%)	Data Realisasi keadaan s/d Triwulan I Tahun 2024
	3. Laju Pertumbuhan PMA	0,3%	Rp. 447.042.339.835,-	1,8%	Data Realisasi keadaan s/d Triwulan I Tahun 2024
Terwujudnya Kepuasan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	4. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100% (5.000 Izin)	3.162 Izin	63,24%	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP 3.162 izin (63,24%)
	5. Nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat	95	91,31	96,11%	Survey dilakukan setiap bulan. Hasil Survey IKM TW. I 93,37 (98,28%) & TW. II 91,31 (96,11%)

	6. Jumlah Inovasi Layanan	1	-	-	
	7. Realisasi Belanja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	90%	45,69% (Rp.3.498.018.885,-)	50,76 %	Sesuai data fungsional, s/d bulan Juni (45,69%)
	8. Realisasi 5 Program Urusan wajib	90%	29,08% (Rp. 712.895.405)	32,31%	Sesuai data fungsional, s/d bulan Juni 2024 (29,08%)
	9. Realisasi APBN (Dana Dekonsentrasi) Tahun anggaran 2024	90%	36,75% (Rp. 211.363.021)	40,83%	Sesuai Data Realisasi s/d bulan Juni 2024 Rp. 211.363.021,-
	10. Belanja Pengadaan Barang Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi e-purchasing	40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	Sudah menggunakan Aplikasi e-purchasing
	11. Penyampaian LPPD, LKPJ dan LKIP paling lambat 12 februari 2024	12 Februari 2024	29 Januari 2024	100%	Lebih cepat dari batas waktu yang ada
	12. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (> 70-80)	80	-	-	Belum ada penilaian
	13. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Minimal A (> 80-90)	90	-	-	Belum ada penilaian
	12. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Baik	Baik	-	-	Belum ada penilaian
	13. Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP				
	a. Temuan Tahun 2024 : Administrasi 100% Keuangan 80%	100% & 80%	-	-	

	b. Temuan di bawah tahun 2024 ; administrasi 100% Keuangan 80%	100% & 80%			
	14. Penciptaan Arsip Elketronik (Korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui Aplikasi Srikandi	80%			Masih belum optimal dalam penggunaan Aplikasi Srikandi
	15. Jumlah inovasi perangkat daerah minimal 5 inovasi	5 Inovasi			Belum ada Inovasi
	16. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik /Minimal kategori Baik (76,61-88,30)	88,30	91,31	105,74%	Hasil Survey Triwulan I Sangat Baik
	17. Tingkat keterbukaan Informasi Publik Minimal kategori Menuju informasi (80 – 89,99)	89,99	-	-	Belum ada Penilaian
	18. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra /NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.				Belum ada Kerjasama

Kupang, 12 Juli 2024

a.n. Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 Pj. Sekretaris



Herry H. A. Pandie, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19710830 200112 1 004

